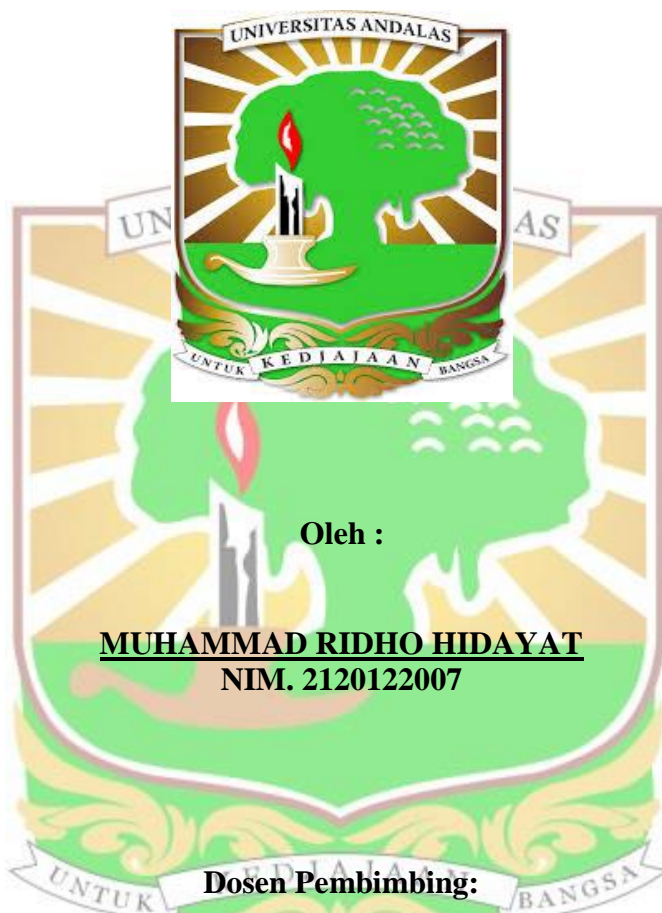


TESIS

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI PROVINSI RIAU

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh :

MUHAMMAD RIDHO HIDAYAT
NIM. 2120122007

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. KURNIA WARMAN, S.H., M. Hum
Dr. SYOFIARTI, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI PROVINSI RIAU

(Muhammad Ridho Hidayat, 2120122007, Program Magister Kenotariatan,
Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 144 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Urgensi tanah di Provinsi Riau, adalah sengketa lahan ataupun konflik antara masyarakat dan perusahaan, serta perorangan dengan koperasi. Masalah sengketa tanah di Provinsi Riau dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2020 terjadi 172 kasus sengketa dan konflik. Yang paling menonjol adalah sengketa penguasaan dan kepemilikan. Permasalahannya terletak pada beberapa sertipikat hak milik yang dibatalkan, walaupun sebelumnya sudah mengalami beberapa peralihan kepemilikan. Hal tersebut akibat ketidaksesuaian antara data yang tertuang dalam isi sertipikat. Solusinya adalah dengan melakukan rekonstruksi kembali objek tanah yang dimintakan kepada Kantor Pertanahan untuk menyelesaikannya secara prosedur melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *Juncto* PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 *Juncto* Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016, yakni melakukan pembatalan secara langsung atas objek tanah yang sertipikatnya belakangan terbit. Berdasarkan hal tersebut maka ada permasalahan mengenai: 1. Apa faktor penyebab sengketa tanah di Provinsi Riau yang berujung pada pembatalan sertipikat hak milik atas tanah dan bagaimana proses pembatalan sertipikat hak milik atas tanah berdasarkan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang sertipikatnya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ? 3. Bagaimana tanggungjawab PPAT terhadap sertipikat hak milik atas tanah yang dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan ? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian di dapatkan bahwa: 1. Faktor penyebab sengketa tanah di Provinsi Riau terjadi karena masalah tata kelola administrasi yang tidak tepat, pemekaran wilayah, legalitas tanah yang tidak jelas, kesulitan dalam pembuktian kepemilikan dan permasalahan hukum yang kompleks terhadap sertipikat hak milik atas tanah di provinsi Riau. Upaya penyelesaian sengketa tanah di provinsi Riau dengan cara penyelesaian lewat musyawarah, mediasi, mediasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), penyelesaian di Pengadilan, penyelesaian melalui kantor pertanahan dan penyelesaian alternatif lainnya. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Sertipikatnya Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat preventif maupun represif. 3. Apabila seorang PPAT melakukan kesalahan yang merugikan pihak yang bersangkutan dan menimbulkan akibat hukum terdapat 4 sanksi yaitu sanksi perdata, pidana, administrasi, kode etik jabatannya.

Kata Kunci : Pembatalan Sertipikat, Putusan Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara.

CANCELLATION OF LAND TITLE CERTIFICATE BASED ON THE DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COURT JUDGE IN RIAU PROVINCE

(Muhammad Ridho Hidayat, 2120122007, Master of Notary Program, Postgraduate Faculty of Law, Andalas University, 144 Pages, 2024)

ABSTRACT

The urgency of land in Riau province, is a land dispute or conflict between the community and the company, as well as individuals with cooperatives. The problem of land disputes in Riau Province in the period from 2015 to 2020 there were 172 cases of disputes and conflicts. The most prominent is the dispute over tenure and ownership. The problem lies in some certificates of ownership that have been canceled, although they have previously experienced several ownership transitions. This is due to a discrepancy between the data contained in the contents of the certificate. The solution is to reconstruct the land object requested by the Land Office to complete it procedurally through the implementation of Government Regulation No. 24 of 1997 Juncto PMNA/Ka. BPN No. 3 of 1997 in conjunction with ATR/BPN Ministerial Regulation No. 11 of 2016, which directly cancels land objects whose certificates have been issued recently. Based on this, there are problems regarding: 1. What are the factors that cause land disputes in Riau province that lead to the cancellation of the certificate of property rights on land and how the process of cancellation of the certificate of property rights on land based on the decision of the Administrative Court Judge ? 2. How is the legal protection of the owner of the right to land whose certificate was canceled by the Administrative Court ? 3. How is PPAT responsible for the certificate of ownership of land that is canceled based on a court decision ? This study uses empirical juridical method. The results of the study found that: 1. Factors causing land disputes in Riau province occur due to improper administrative governance problems, territorial expansion, unclear land legality, difficulties in proving ownership and complex legal issues against certificates of property rights to land in Riau province. Efforts to resolve land disputes in Riau Province by way of settlement through deliberation, mediation, mediation by Non-Governmental Organizations (NGOs), settlement in court, settlement through the Land Office and other alternative solutions. 2. Legal protection of owners of Land Rights whose certificates have been canceled by the Administrative Court is preventive as well as repressive. 3. If a PPAT makes a mistake that harms the party concerned and causes legal consequences, there are 4 sanctions, namely civil, criminal, administrative sanctions, the code of ethics of his position.

Keywords: *Certificate Cancellation, Judge's Decision, Administrative Court.*